

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Akhlak Siswa Di Era Digital: Studi Literatur

Halimah Tus sa'diah¹, Sabilla Seviana², Agus Dwi Prasajo³



¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

³ Universitas Islam An Nur Lampung

Corresponding author: halimahtussadiah543@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 Agustus 2025

Revised 20 Agustus 2025

Accepted 1 September 2025

Available online 30 September 2025

Kata Kunci:

Era Digital, Karakter, Kewarganegaraan, Penelitian Literatur.

Keywords:

Digital Era, Character, Citizenship, Literature Research.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk karakter siswa di era digital adalah tujuan penelitian ini. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menganalisis literatur dari berbagai sumber ilmiah. PPKn memiliki fungsi strategis dalam membangun warga negara yang berkarakter, cerdas, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh teknologi dan media sosial, yang seringkali menimbulkan degradasi moral, membuat tantangan karakter di era digital semakin kompleks. Kajian ini menemukan bahwa PPKn berperan penting dalam menanamkan nilai moral, etika digital, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial melalui pembelajaran kontekstual dan adaptif. Pendidikan karakter berbasis digital citizenship adalah cara yang bagus untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan digital.

ABSTRACT

The role of Citizenship Education (PPKn) in shaping students' character in the digital era is the objective of this study. To achieve this goal, this study analyzes literature from various scientific sources. PPKn has a strategic function in developing citizens with character, intelligence, and active participation in social, national, and state life. The influence of technology and social media, which often lead to moral degradation, makes character challenges in the digital era increasingly complex. This study finds that PPKn

plays a crucial role in instilling moral values, digital ethics, nationalism, and social responsibility through contextual and adaptive learning. Digital citizenshipbased character education is an excellent way to incorporate Pancasila values into digital life.

PENDAHULUAN

Menurut (Suyanto, 2018) Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan kualitas suatu bangsa karena melalui pendidikan, orang diharuskan memiliki bukan hanya kemampuan intelektual tetapi juga nilai moral dan sifat yang kuat. Dalam situasi seperti ini. Menurut (Winarno, 2013) Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) adalah alat penting untuk membentuk kepribadian warga negara Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan karakter dan moral yang mencerminkan identitas bangsa. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis.

Namun, peran pendidikan moral dan karakter menghadapi tantangan besar di era digital seperti saat ini. Cara orang berpikir, berinteraksi, dan membentuk identitas mereka telah diubah oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Siswa di era digital berinteraksi baik di dunia nyata maupun di dunia maya yang penuh dengan informasi.

*Corresponding author

E-mail addresses: halimahtussadiah543@gmail.com (Halimah Tus sa'diah)

Menurut (Hidayat, R., 2019) dunia digital menawarkan banyak keuntungan dalam mempermudah akses ke pengetahuan, juga memiliki efek negatif, seperti kehilangan etika, perilaku individualistik, dan penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Sehubungan dengan fenomena ini, PPKn harus berperan aktif dalam mengajarkan siswa cara bijak menggunakan teknologi. Menurut (Tapscott, D., 2010), generasi yang tumbuh dengan teknologi digital dikenal sebagai digital *natives*, yaitu individu yang sangat akrab dengan dunia maya, tetapi seringkali kurang memiliki kecakapan moral dan etika sosial.

Oleh karena itu, pendidikan karakter melalui PPKn harus disesuaikan dengan perubahan zaman dengan menggabungkan pendidikan literasi digital dan etika media sebagai bagian dari pembelajaran kewarganegaraan. Selain itu, Menurut (Kemendikbudristek, 2022) sebagai ideologi bangsa, Pancasila harus menjadi landasan utama dalam menghadapi era digital dan globalisasi. Agar generasi muda tidak kehilangan jati diri bangsa, nilai-nilai moral seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial berfungsi sebagai filter moral.

Pendidikan karakter berbasis PPKn di era digital harus diarahkan untuk membentuk warga negara digital, atau warga negara digital, yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi tetapi juga memiliki etika sosial dan bertanggung jawab. Guru PPKn memainkan peran penting dalam proses tersebut. Selain berfungsi sebagai penyampai materi, guru juga berfungsi sebagai teladan moral bagi siswa mereka. Dalam konteks kehidupan digital, guru dapat menanamkan nilai seperti tanggung jawab, empati, toleransi, dan cinta tanah air melalui pembelajaran berbasis nilai, diskusi etika, dan simulasi sosial digital.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai studi literatur untuk melihat bagaimana PPKn membentuk karakter siswa di era digital. Melalui analisis konseptual literatur yang relevan, diharapkan penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang metode, masalah, dan solusi untuk menerapkan pendidikan karakter berbasis kewarganegaraan di era modern. Dengan kata lain, Menurut (Daryanto, 2016) PPKn tidak hanya berfungsi sebagai alat pendidikan formal, tetapi juga berfungsi sebagai pertahanan moral bangsa yang menjaga agar kemajuan teknologi tidak mengikis nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan generasi berikutnya di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan dari kurikulum nasional adalah untuk membuat siswa menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan PPKn adalah komponen dari kurikulum nasional, menurut (Winantaputra, 2016). PPKn adalah proses pendidikan yang mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, bertindak demokratis, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara mereka sendiri. Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dasar PPKn di Indonesia. Siswa ditanamkan rasa kebangsaan dan patriotisme melalui keempat pilar kebangsaan ini.

Menurut (Daryanto, 2016) PPKn tidak hanya meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan tetapi juga menekankan pembentukan sikap dan perilaku moral. Proses pembelajaran PPKn mencakup pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (pengetahuan kewarganegaraan), keterampilan kewarganegaraan (keterampilan sosial dan politik), dan disposisi kewarganegaraan (sikap dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan).

Profil Pelajar Pancasila yang digambarkan dalam Kurikulum Merdeka mencakup hal-hal seperti iman dan takwa, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Dengan demikian, PPKn membantu pembentukan identitas nasional dan karakter moral peserta didik, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, (Hosnan, M., 2014)

2. Pembentukan Karakter

Penanaman nilai-nilai moral, etika, dan perilaku yang baik untuk membentuk kepribadian yang baik disebut pendidikan karakter. Menurut (Suyanto, 2018) menyatakan bahwa pendidikan karakter memiliki peran strategis untuk mengatasi krisis moral yang terjadi di kalangan remaja, seperti kurangnya rasa hormat, tanggung jawab, dan disiplin.

Di Indonesia, pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, termasuk PPKn, karena memiliki kedekatan dengan nilai dan fungsi pembentukan moral kebangsaan. Pembelajaran

berbasis nilai, keteladanan guru, budaya sekolah, dan pembiasaan sikap positif semua berkontribusi pada pembentukan karakter di sekolah.

Guru PPKn berperan penting sebagai teladan moral yang menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, toleransi, dan rasa cinta tanah air kepada siswa mereka. (Kemendikbud, 2017) Selain itu, pembentukan karakter harus mempertimbangkan konteks sosial yang selalu berubah.

(Sapriya, 2017) Karena siswa dihadapkan pada nilai-nilai yang beragam di era globalisasi, identitas dan karakter kebangsaan harus dikuatkan untuk mencegah pengaruh budaya asing. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila adalah dasar penting bagi generasi muda untuk menjadi warga negara yang bermoral dan beretika di tengah tantangan zaman.

3. Era Digital dan Tantangan Moral

Selama era digital, pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial manusia mengalami perubahan besar. Teknologi digital memungkinkan orang berinteraksi secara cepat dan luas, tetapi menghasilkan pergeseran nilai moral karena kekurangan kontrol sosial. (Tapscott, D., 2010) menyebut generasi masa kini sebagai digital *natives*, yaitu generasi yang tumbuh bersama teknologi tetapi cenderung memiliki perbedaan moral dan etika dalam penggunaan teknologi mereka.

Bagi dunia pendidikan, kondisi ini menjadi tantangan serius. Banyak siswa yang menggunakan media digital tanpa memahami etika media, yang menyebabkan perilaku negatif seperti *cyberbullying*, *plagiarisme*, ujaran kebencian, dan penyebaran *hoaks*. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk literasi digital yang beretika dan berbasis nilai Pancasila.

Menurut (Prensky, 2012), pengembangan karakter digital harus diarahkan untuk pembentukan warga negara digital, yaitu individu yang memiliki kemampuan teknologi dan memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam ruang maya. Dalam situasi seperti ini, PPKn dapat mengintegrasikan pendidikan karakter digital melalui pembelajaran berbasis proyek, diskusi tentang nilai, dan refleksi tentang masalah sosial digital.

Selain itu, melalui Kurikulum Merdeka, pemerintah mendorong profil siswa Pancasila yang relevan dengan dunia modern, seperti kemampuan berpikir kritis, kerja tim, dan kesadaran akan kebinekaan global, (Kemendikbudristek, 2022). Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis PPKn di era modern membentuk siswa yang tidak hanya cerdas teknologi tetapi juga beretika, bertanggung jawab, dan memiliki nasionalisme yang kuat, (Wintaputra, 2016)

METHODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, atau penelitian kepustakaan, yang berarti mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari literatur yang relevan. (Zed, M., , 2014) menyatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mencakup pengumpulan data, teori, dan konsep yang relevan dengan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian di mana peneliti mencoba memahami fenomena melalui penelusuran dan analisis teori yang ada. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan, tetapi berfokus pada analisis konten dan sintesis ide dari berbagai referensi yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Berdasarkan penelaahan literatur yang berbeda, ditemukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memainkan peran penting dalam membentuk karakter siswa, terutama di tengah tantangan era digital. Kemajuan teknologi digital juga membantu proses pembelajaran dengan memberi siswa akses lebih mudah ke sumber belajar dan informasi. Sebaliknya, kemajuan ini menimbulkan tantangan besar untuk pembentukan nilai dan etika peserta didik.

1. PPKn Sebagai Wahana Penanaman Nilai Pancasila di Era Digital

PPKn berfungsi sebagai alat strategis untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pembelajaran PPKn, siswa diarahkan untuk memahami makna nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang kini semakin tergerus oleh individualisme sebagai akibat dari pengaruh media digital, (Somantri, N., , 2011)

(Wintaputra, U.S., 2016) menemukan bahwa PPKn berfungsi sebagai pendidikan nilai dan moral dengan menekankan pembentukan karakter warga negara demokratis dan Pancasila. Menurut (Kurniasih, 2021) Dalam era digital, penggabungan nilai-nilai ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), keterlibatan masyarakat digital, dan kegiatan diskusi online yang meningkatkan etika berpendapat di ruang digital.

2. Penguatan Literasi Digital Melalui Pembelajaran PPKn

Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis untuk menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga etika untuk menggunakan media digital dengan benar. Akibatnya, PPKn memainkan peran penting dalam mempromosikan literasi digital yang berbasis nilai-nilai moral dan tanggung jawab kewarganegaraan.

Dalam konteks PPKn, literasi digital dimaksudkan untuk membangun "*warga digital*" atau warga digital yang tidak hanya cerdas teknologi tetapi juga memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap masalah nasional. Menurut (Kurniasih, I., 2021). Hal ini sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang mendorong profil siswa Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan kreatif.

Pembelajaran aktif (PPKn) dapat membantu siswa memahami etika digital, menilai kebenaran informasi (anti-hoaks), dan meningkatkan kesadaran hukum di dunia maya. (Suryadi, A., 2021) Pembelajaran jenis ini dapat diterapkan melalui kegiatan seperti analisis berita online, simulasi debat online, atau refleksi terhadap isu-isu sosial yang sedang berkembang.

3. Peran Guru PPKn dalam Membentuk Karakter Siswa di Dunia Digital

Guru PPKn memiliki peran ganda sebagai pendidik karakter dan fasilitator digital. Dalam konteks ini, guru tidak hanya menyampaikan materi pengetahuan kewarganegaraan tetapi juga menjadi role model atau contoh yang baik dalam penggunaan teknologi. Untuk membangun interaksi pembelajaran yang bermakna, guru dapat memanfaatkan media digital seperti video pembelajaran, pembelajaran e-learning, dan media sosial.

Meskipun demikian, penggunaan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan etika bermedia. Menurut (Suyanto, 2019), pendidikan karakter akan berhasil jika guru dapat menampilkan integritas pribadi dan konsistensi nilai dalam perilaku sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di internet.

Guru juga bertanggung jawab untuk melindungi siswa dari pengaruh negatif internet. Mereka harus mengajarkan siswa untuk menggunakan media sosial dengan bijak, memahami bahaya ujaran kebencian, dan membangun sikap toleransi dan empati saat berkomunikasi di internet. (Suryadi, 2021)

4. Sinergi PPKn dan Teknologi dalam Membangun Warga Negara Digital yang Berkarakter

Tidak perlu menganggap era digital sebagai ancaman bagi pendidikan karakter; sebaliknya, itu harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks baru. Pembelajaran PPKn dapat diintegrasikan dengan teknologi melalui pendekatan seperti pembelajaran campuran atau gamifikasi nilai, (Nasrullah, R., 2019).

Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar tentang ide-ide kewarganegaraan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Contoh metode ini termasuk debat virtual, simulasi pengambilan keputusan publik, dan refleksi digital tentang masalah nasional. PPKn sangat penting untuk menghasilkan generasi yang "melek digital dan bermoral Pancasila" yakni orang yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengakses dan mengolah data, tetapi juga menilai informasi tersebut berdasarkan prinsip moral dan tanggung jawab sosial mereka.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat strategis dan relevan dalam membentuk karakter siswa di era digital, menurut temuan kajian literatur dan analisis literatur. Pendidikan tidak hanya membantu menyebarkan informasi, tetapi juga membantu siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab baik di dunia nyata maupun virtual.

Pertama, PPKn berfungsi sebagai pendidikan nilai dan moral berbasis Pancasila, yang berperan penting dalam menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah tantangan globalisasi digital.

Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar utama dalam mengarahkan perilaku siswa untuk tetap berpegang pada etika kebangsaan baik dalam aktivitas digital maupun kehidupan sehari-hari.

Kedua, PPKn berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menanamkan karakter dan moralitas digital (*digital ethics*). Siswa dapat belajar tentang pentingnya menggunakan media sosial dengan hati-hati, menjaga privasi orang lain, dan menghindari perilaku negatif seperti cyberbullying, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong (*hoaks*) melalui pembelajaran PPKn yang berfokus pada penguatan literasi digital. Dengan demikian, pembelajaran PPKn tidak hanya berfokus pada aspek kognitif.

Ketiga, kompetensi kewarganegaraan digital juga dikenal sebagai kewarganegaraan digital adalah kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat yang berbasis teknologi. Guru PPKn sangat bertanggung jawab untuk menanamkan pemahaman bahwa menjadi warga digital memerlukan keterampilan teknis selain kesadaran moral, hukum, dan sosial yang melandasi setiap tindakan.

Keempat, peran guru PPKn sangat penting dalam membentuk karakter siswa di era modern. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga berfungsi sebagai teladan moral dan fasilitator yang membantu siswa menggunakan teknologi secara positif. Guru yang mampu menggunakan media digital dengan bijak, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kegiatan belajar berbasis teknologi, dan menumbuhkan semangat reflektif pada siswa akan mampu membentuk generasi ya

Kelima, nilai-nilai PPKn dan teknologi digital dapat digabungkan untuk membuat sistem pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan bermakna. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kewarganegaraan melalui pendekatan seperti pembelajaran campuran, pembelajaran berbasis proyek, dan gamifikasi berbasis nilai nasional. Metode-metode ini juga memungkinkan mereka untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam dunia digital dan kehidupan nyata.

Keenam, pembelajaran PPKn di era digital harus diorientasikan untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila. Profil ini mencakup aspek iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, gotong royong, kebinekaan global, kreativitas, dan nalar kritis. Dalam menghadapi tantangan era digital, prinsip-prinsip ini sangat penting karena sering mengikis nilai-nilai kebangsaan, solidaritas sosial, dan moralitas generasi muda.

Selain itu, PPKn harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Agar pendidikan nilai tetap kontekstual dan menarik, kurikulum, metode pembelajaran, dan media ajar harus disesuaikan dengan fitur generasi digital. Teknologi informasi harus digunakan tidak hanya untuk membantu siswa belajar, tetapi juga untuk memupuk karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan Pancasila.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pilar utama dalam pembentukan karakter siswa di era digital. Melalui sinergi antara pendidikan nilai, literasi digital, dan penguatan etika bermedia, PPKn dapat menghasilkan generasi muda yang berpengetahuan, jujur, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan semangat kebangsaan dan moralitas tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pembelajaran PPKn akan terus berkembang.

REFERENCES

- Daryanto. (2016). Yogyakarta: Gava Media. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membentuk Karakter Bangsa*, hlm. 33.
- Daryanto. (2016). Yogyakarta: Gava Media. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membentuk Karakter Bangsa*, hlm. 20.
- Hidayat, R.,. (2019). Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 9 No.1. *Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital*, 22-30.
- Hosnan, M.,. (2014). Bogor: Ghalia Indonesia. *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*, hlm. 35.
- Kemendikbud. (2017). Jakarta. *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter*, hlm. 15.

- Kemendikbudristek. (2022). Jakarta. *Profil Pelajar Pancasila dan Implementasinya dalam Kurikulum Merdeka*, hlm.19.
- Kemendikbudristek. (2022). Jakarta: Kemendikbudristek. *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka*, hlm. 15.
- Kurniasih. (2021). Yogyakarta: Deepublish. *Pembelajaran PPKn Berbasis Digital Citizenship*, hlm. 27.
- Nasrullah, R., (2019). Jakarta: Prenada Media. *Literasi Digital di ERA Disrupsi*, hlm. 18.
- Prensky. (2012). California: Corwin. *From Digital Natives to Digital Wisdom*, hlm. 31.
- Sapriya. (2017). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Pembelajaran*, hlm. 17.
- Somantri, N., . (2011). Bandung: Remaja Rosdakarya. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Global*, hlm. 40.
- Suryadi. (2021). Jurnal Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan. *Peran PPKn dalam Mengembangkan Literasi Digital Siswa*, hlm. 138.
- Suryadi, A., (2021). Jurnal Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan, Vol.7 No.2. *Peran PPKn dalam Mengembangkan Literasi Digital Siswa*, hlm. 134.
- Suyanto. (2018). Jakarta: Gramedia. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Bangsa Berkarakter*, hlm. 42.
- Suyanto. (2018). Jakarta:Gramedia. *Pendidikan Karakter:Strategi Membangun Bangsa Berkarakter*, hlm.2.
- Suyanto. (2019). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. *Menjadi Guru Yang Menginspirasi di Era Digital*, hlm. 22.
- Suyanto. (2019). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. *Menjadi Guru yang Menginspirasi di Era Digital*, hlm. 22.
- Tapscott, D., (2010). New York: McGraw-Hill. *Grow Up Digital*, hlm. 22.
- Tapscott,D., (2010). New York:McGraw-Hill. *Grown Up Digital*, hlm.25.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (t.thn.). *Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 20 Tahun 2003*.
- Winantaputra. (2016). Jakarta: Universitas Terbuka. *Civic Education: Konsep dan Strategi Pembelajaran*.
- Winarno. (2013). Jakarta: Bumi Aksara. *Pendidikan Kewarganegaraan: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*, hlm.11.
- Wintaputra. (2016). Jakarta: Universitas Terbuka. *Civic Education: Konsep dan Strategi Pembelajaran*, hlm. 25.
- Wintaputra, U.S. (2016). Jakarta: Universitas Terbuka. *Civic Education: Konsep dan Strategi Pembelajaran*, hlm. 32.
- Zed, M., (2014). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. *Metode Penelitian Kepustakaan*, hlm. 3.